SOAL LATIHAN
TES PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PPPK GURU – SD (SEKOLAH DASAR)

MATERI PPKn (SD)

A. Soal Dan Pembahasan Kompetensi Pedagogik

Materi Pokok	Capaian Pembelajaran	Indikator Esensial
PPKn SD	Menguasai teori dan aplikasi pedagogis *(pedagogical content knowledge)* minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran bidang studi yang mendidik	Mampu menerapkan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran yang mendidik dalam pembelajaran PPKn di kelas

Soal 1

Dalam pembelajaran PPKn guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip pengembangan RPP berbasis "konteks", yang memiliki makna bahwa ....

A. adanya konsistensi antara kompeteni dasar, indkator, dan materi
B. pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian
C. proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar
D. kompetensi inti merupakan acuan utama dalam pengembangan RPP
E. adanya hubungan antara yang menjadi materi pelajaran

Kunci Jawaban: B

Pembahasan

Dalam pembelajaran PPKn guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Salah satu prinsip dari pengembangan RPP adalah berbasis "konteks", artinya pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian.

Materi Pokok	Capaian Pembelajaran	Indikator Esensial
PPKn SD	Mampu merencanakan pembel-ajaran yang mendidik sesuai de-ngan karakteristik pembelajaran mata pelajaran yang diampu, me-liputi: merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembel-ajaran berdasarkan standar kom-petensi lulusan; menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran; dan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai silabus pada kurikulum yang berlaku.	Mampu merumuskan indikator hasil belajar PKn dari satu KD di dalam kurikulum PKn

Soal 2

Seorang guru PPKn SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar akan melaksanakan tes subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan obervasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi yang dilakukan guru dengan melakukan kegiatan seperti itu dalam pembelajaran, dikenal dengan ….

A. evaluasi akhir semester
B. evaluasi proses dan hasil
C. evaluasi dalam proses
D. authentic assessment
E. evaluasi hasil belajar

Kunci Jawaban: D

Pembahasan

Seorang guru PPKn SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar, melaksanakan subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan obervasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu, Evaluasi dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, dikenal dengan *authentic assessment.*

Materi Pokok	Capaian Pembelajaran	Indikator Esensial
PPKn SD	Mampu merancang dan melak-sanakan penelitian yang relevan dengan masalah pembelajaran sesuai kaidah penelitian ilmiah	Mampu menguraikan kegiatan refleksi ketika melakukan PTK dalam pembelajaran PPKn

Soal 3

Di sebuah Sekolah Dasar, dalam satu kelas terdiri dari 26 peserta didik yang kemampuan belajarnya beragam. Tujuh peserta didik tampak sangat menonjol bagus dalam memahami pelajaran, sementara ada enam peserta didik yang kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran, sedang sisanya biasa saja. Tujuh peserta didik yang menonjol bagus kadang justru menggangu temannya yang belum memahami pelajaran. Jika akan dilakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran, variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah ….

A. model pembelajaran
B. pemahaman
C. jumlah peserta didik
D. kesulitan belajar.
E. kemampuan belajar

Kunci Jawaban: B

Pembahasan

Variabel yang terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah pemahaman. Melalui penelitian akan dapat diukur bagaimana upaya yang dilakukan olej guru dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik. Peningkatan pemahaman dapat dilakukan dengan melakukan eksperimen atau tindakan dengan menerapkan model, media, pengembangan materi, dan atau perlakuan lain dalam pembelajaran.

Materi Pokok	Capaian Pembelajaran	Indikator Esensial

PPKn SD	Mampu melaksanakan pembel-ajaran yang mendidik dengan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan poten-si diri siswa sebagai pembelajar mandiri *(self regulated learner)*	Mampu menilai kelebihan dan kelemahan pembelajaran PPKn dengan model kooperatif

Soal 4

Seorang guru SD kelas 4 dalam muatan pembelajaran PPKn memulai pembelajaran dengan menyampikan beberapa penjelasan berdasar pokok-pokok materi pembelajaran. Lalu membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, setelah selesai tugasnya siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Selesai presentasi siswa diberi hadiah sebagai penghargaan atas keberhasilannya. Guru tersebut menerapkan model pembelajaran ....

A. kontekstual
B. direct
C. berbasis masalah
D. kooperatif
E. berbasis *project*

Kunci Jawaban: D

Pembahasan

Guru SD kelas 4 yang memulai pembelajaran dengan menyampikan penjelasan berdasar pokok-pokok materi pembelajaran, membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan melaporkan hasil diskusi kelompoknya ini menerapkan model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran PPKn mengajarkan kepada peserta didik keterampilan kewarganegaraan *(civic skills).*

B. Soal Dan Pembahasan Kompetensi Profesional

Materi Pokok	Capaian Pembelajaran	Indikator Esensial
PPKn SD	Mampu menguasai konsep teoretis materi pelajaran PKn yang diampu secara mendalam meliputi bidang/aspek Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika	Mampu memberi contoh penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI

Soal 1

Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Konsekuensi penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI adalah ....

A. segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila

B. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari
C. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa
D. Pancasila menjadi kepribadian bangsa Indonesia
E. Ciri khas bangsa Indonesia

Kunci Jawaban: A

Pembahasan

Konsep kunci yang perlu dicermati adalah *fungsi* (Pancasila) dalam konteks *dasar* (yang bersifat mendasari) serta lingkup wadah (*negara)* BUKAN dikaitkan dengan *bangsa* atau manusianya (sebagaimana pengecoh jawaban yang menekankan bangsa atau kehidupan sehari hari manusianya). Kata yang jelas membantu adalah landasan bagi penyelenggara *negara* dan pelaksanaan *pemerintahan.* Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dimana segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Sejalan dengan teori Hans Kelsen tentang kaidah hukum berjenjang, artinya peraturan di bawah harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan pada peraturan di atasnya, maka pasal 7 undang-undang UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa hirarki peraturan perundangan di Indonesia adalah sebagai berikut.

a. UUD NRI Tahun 1945;
b. Ketetapan MPR;
c. UU/Perpu
d. Peraturan Pemerintah (PP);
e. Peraturan Presiden (Perpres);
f. Peraturan Daerah Provinsi;
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Materi Pokok	Capaian Pembelajaran	Indikator Esensial
PPKn SD	Mampu menguasai konsep teoretis materi pelajaran PKn yang diampu secara mendalam meliputi bidang/aspek Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika	Mampu menjelaskan hubungan sila I Pancasila dengan kehidupan beragama di Indonesia

Soal 2

Manakah pernyataan berikut tentang Pancasila sila pertama yang paling benar?
A. Sila I Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib beragama.
B. Sila I Pancasila mengamanatkan bahwa peraturan perundangan didasarkan pada agama.
C. Sila I Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib ber-Tuhan yang diwujudkan dengan memeluk agama atau kepercayaannya.
D. Sila I memberikan kebebasan kepada setiap warganegara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, aturan dan penyelenggaan bernegara harus ber-Ketuhanan YME.
E. Sila I Pancasila mencintai sesama sesuai dengan keyakinan agamanya.

Kunci Jawaban: D

Pembahasan

Jawaban ini *paling benar karena paling lengkap* dengan merujuk pada (1) pengakuan adanya Tuhan yang tertuju pada sisi vertikal dan (2) rukun antar umat beragama yang mengarah pada sisi horizontal, serta penegasan (3) aturan dan penyelenggaan bernegara harus ber-

Ketuhanan YME. **Sila ke-1** memberikan kebebasan kepada setiap warganegara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama. Hal ini berarti bahwa setiap warganegara (1) mengakui adanya Tuhan yang diwujudkan dengan memeluk dan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, (2) bertoleransi, tidak mempertentangkan keyakinan intra dan antar pemeluk agama, tidak ada pemaksaan dalam keyakinan, (3) aturan dan penyelenggaan bernegara harus ber-Ketuhanan YME.

Materi Pokok	Capaian Pembelajaran	Indikator Esensial
PPKn SD	Mampu menguasai konsep teoretis materi pelajaran PKn yang diampu secara mendalam meliputi bidang/aspek Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika	Mampu membandingkan prinsip negara hukum formal dan negara hukum material

Soal 3

Negara hukum material dan negara hukum formil merujuk pada tradisi yang berbeda dari paham *rechtsstaat* dan *the rule of law.* Manakah pernyataan di bawah ini yang benar dalam membedakan antara negara hukum material dan negara hukum formil ?

A. Paham *rechtsstaat* menekankan substansi material
B. Paham *rechtsstaat* menekankan bentuk aturan hukum
C. Paham *rechtsstaat* menekankan proses persidangan.
D. Paham *rechtsstaat* menekankan hukum acara persidangan
E. Paham *rechtsstaat* menekankan tata cara persidangan hakim memberi putusan

Kunci jawaban: A

Pembahasan

Hal yang perlu dicermati adalah (1) paham *rechtsstaat* lebih menekankan materi hokum yang dijalankan oleh penyelenggara negara, sedangkan *the rule of law* lebih menekankan bentuk aturan yang pasti. (2) paham *rechtsstaat* mengikuti pola tradisi Eropa Kontinental, sedangkan *the rule of law* mengikuti pola di Inggris. Prinsip negara hukum Indonesia tidak merujuk secara khusus dan langsung pada dua aliran yang berbeda tentang negara hukum. Paham *rechtsstaat* dikembangkan di Eropa Kontinental yang lebih menekankan substansi *material dan semangat penyelenggara negara yang adil (negara hukum material)* bukannya *bentuk aturan yang ketat*, sedangkan paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum *anglo saxon atau Inggris*. *Negara hukum formal* bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar adanya bentuk aturan hukum yang jelas, pasti, adil dan baik. Negara hukum formal disebut juga negara undang-undang karena implementasi penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan hanya atas aturan perundangan yang tertulis (hukum tertulis). Berdasarkan ketentuan Amandemen UUD 1945, ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi, ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: adanya norma material yang mengatur hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan *(machtstaat)*; kedua: bentuk aturan dan tata cara formal yang jelas dan pasti.

Materi Pokok	Capaian Pembelajaran	Indikator Esensial

PPKn SD	Mampu menguasai konsep teoretis materi pelajaran PKn yang diampu secara mendalam meliputi bidang/aspek Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika	Mampu mengkritisi kelemahan penegakan HAM di Indonesia

Soal 4

Penegakan HAM di Indonesia terkendala antara lain oleh lemahnya pengawasan masyarakat dan perlunya penguatan Lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum. Usulan upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia yang tergolong pada Lembaga Swadaya Masyarakat adalah ....

A. Undang-undang Pengadilan HAM
B. Komnas HAM, lembaga Pengadilan HAM, dan KPAI
C. YLBHI dan Kontras
D. KNPA dan KPAI, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan,
E. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Kunci Jawaban : C

Pembahasan

Cukup jelas. YLBHI dan Kontras. Penekanan ada pada Lembaga yang dibentuk masyarakat, bukan oleh pemerintah. Penegakan HAM di Indonesia perlu pengawasan dari masyarakat dan penguatan lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat menjadi kekuatan yang mampu mengkritisi upaya pemerintah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia.

Materi Pokok	Capaian Pembelajaran	Indikator Esensial
PPKn SD	Mampu menguasai konsep teoretis materi pelajaran PKn yang diampu secara mendalam meliputi bidang/aspek Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika	Mampu menerapkan prinsip-prinsip nasionalisme dan integrasi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia

Soal 5

Selalu membina kerukunan, persatuan dan kesatuan di lingkungannya serta mencintai budaya bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan merupakan pencerminan dari ....

A. Kerelaan berkorban
B. Cinta tanah air
C. Sadar bernegara Indonesia
D. Sadar berbangsa Indonesia
E. Jati diri bangsa indonesia

Kunci jawaban B

Pembahasan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bangsa yang lahir karena adanya contoh sikap cinta tanah air. Tanpa rasa cinta tanah air, negara ini tidak akan terbentuk. Seperti yang kita tahu, bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat. cinta tanah air juga merupakan sebuah kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, menghormati, dan loyalitas sehingga menimbulkan keinginan untuk merawat dan

membela tanah air. Dari semua definisi diatas, semuanya merujuk pada ungkapan bahwa kecintaan itu menimbulkan rasa memiliki dan ingin melindungi apa yang kita miliki.

Materi Pokok	Capaian Pembelajaran	Indikator Esensial
PPKn SD	Mampu menguasai konsep teoretis materi pelajaran PKn yang diampu secara mendalam meliputi bidang/aspek Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika	Mampu membandingkan sistem pemerintahan negara federal dan system pemerintahan dengan azas desentralisasi

Soal 6

Gagasan bahwa negara perlu menata kewenangannya dengan adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sistem pemerintahan yang di anut Republik Indonesia saat ini adalah.....

A. Federal
B. Monarkhi
C. Presidensial asas desentralisasi
D. Presidensial asas sentralisasi
E. Parlementer

Kunci Jawaban : C

Pembahasan

Sistem pemerintahan merupakan serangkaian cara yang digunakan suatu negara untuk mengatur segala yang berhubungan dengan kepemerintahan dan kenegaraan. Aturan pemerintahan yang masuk dalam sistem berkaitan dengan sekumpulan aturan dasar tentang pola kepemerintahan, pola pengambilan kebijakan, pola pengambilan keputusan, dan lainnya. Untuk mengatur negara dan pemerintahannya setiap negara memilih sendiri sistem pemerintahan yang sesuai dengan negaranya. Terdapat beberapa sistem pemerintah di dunia, yaitu sistem pemerintahan presidensial, parlementer, semi presidensial, liberal, demokrasi liberal, dan komunis. Di mana antara satu dengan lainnya memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahannya masing-masing. Sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia saat ini sama dengan sistem pemerintahan setelah amandemen UUD 1945, yaitu presidensial. Sistem pemerintahan presidensial berarti bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Sistem pemerintahan presidensial berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer. System pemerintahan *presidensial asas desentralisasi* adalah dengan adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Materi Pokok	Capaian Pembelajaran	Indikator Esensial
PPKn SD	Mampu menguasai konsep teoretis materi pelajaran PKn yang diampu secara mendalam meliputi bidang/aspek Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika	Mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab melemahnya kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia dalam kehidupan masyarakat yang multikultur

Soal 7

Salah satu kerugian yang paling utama ditimbulkan oleh ekstrimisme dalam kehidupan masyarakat multikultur, berbangsa dan bernegara adalah….

A. Tumbuhnya sikap menang sendiri
B. Semakin kuatnya individualisme
C. Terjadinya perpecahan
D. Menimbulkan rasa saling curiga
E. Berkembangnya nasionalisme sempit

Kunci Jawaban : C

Pembahasan

Multikultur atau keberagaman merupakan karakteristik dari bangsa Indonesia yang terdiri dari beragamnya suku bangsa, etnis, ras, agama, dan kebudayaan daerahnya. Relitas keberagaman atau multikultur ini rentang akan terjadinya konflik, baik vertikal maupun horizontal. Untuk menghadapi realitas bangsa Indonesia yang penuh keberagaman ini, maka diperlukan kompetensi atau sikap yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia. Dengan kondisi keberagaman yang demikian, proses pembelajaran di Indonesia harus memfasilitasi dan mendukung multikulturalisme. Bangsa Indonesia harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengetahui tentang nilai-nilai keberagaman yang ada di negaranya dan dibelajarkan untuk memiliki sikap saling menghargai dan toleransi yang bertanggung jawab agar terciptanya kehidupan di dalam harmoni perbedaan. Upaya untuk mencegah terjadinya gesekan atau konflik akibat multikulturalisme adalah dengan menumbuhkembangkan sikap saling menghargai atau toleransi antar sesama. Selain itu, menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal agar bersama-sama mendorong tujuan nasional dan mencerminkan identitas nasionalnya. Dengan demikian, kita bisa menjaga keberlangsungan hidup bangsa yang majemuk atau multikultur dengan saling menghargai, tanpa harus meniadakan kemajemukan itu. Jika ekstrimisme dalam kehidupan masyarakat multikultur, berbangsa dan bernegara muncul akan dapat menimbulkan perpecahan.

Materi Pokok	Capaian Pembelajaran	Indikator Esensial
PPKn SD	Mampu menguasai konsep teoretis materi pelajaran PKn yang diampu secara mendalam meliputi bidang/aspek Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika	Mampu menerapkan prinsip dan nilai-nilai pasca modern abad globalisasi untuk memajukan kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultur

Soal 8

Dengan adanya perubahan zaman abad globalisasi, berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebaiknya kita .....
A. Memanfaatkan kemajuan secara keseluruhan
B. Berhati-hati dalam dalam menerapkan kemajuan Iptek
C. Kita harus memanfaatkan potensi bangsa kita sendiri
D. Tidak semua yang modern itu baik untuk bangsa
E. Menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai pancasila
Kunci Jawaban: E

Pembahasan

Globalisasi merupakan fenomena mendunianya suatu peradaban, yang saat ini adalah mendunianya peradaban atau kebudayaan barat. Sehingga globalisasi sebenarnya berdampak positif dan negatif bagi negara-negara di dunia. Misalnya dampak negatif globalisasi adalah kebebasan yang tak terbatas atau kebablasan. Tata kelakuan dan pola hidup bangsa timur semakin bergeser mengikuti arus kebarat-baratan *(westernisasi).* Pancasila sebagai dasar

Negara Indonesia menjadi penyaring dalam kemajuan globalisasi yang tidak bisa dihindari.

Materi Pokok	Capaian Pembelajaran	Indikator Esensial
PPKn SD	Mampu memilih dan meng gunakan fakta dan peristiwa sosial kewarganegaraan sebagai laboratorium PPKn di masyarakat untuk pengembangan materi PPKn	Mampu memilih dengan argumentasi yang benar fakta dan peristiwa sosial kewarganegaraan yang dapat dijadikan pengembangan materi PKn

Soal 9

Salah satu tujuan amandemen terhadap UUD 1945 adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial yang dilakukan dengan....

A. Kedudukan presiden sebagai kepala negara
B. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD
C. Pemisahan kedudukan presiden dengan lembaga legislatif
D. Pemilihan Presiden dan Wapres dilakukan secara langsung
E. Presiden di pilih lima tahun sekali

Kunci Jawaban : D

Pembahasan

Tujuan amandemen UUD 1945 adalah Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka mempertegas system presidensial maka salah satu amandemen UUD adalah Pemilihan Presiden dan Wapres dilakukan secara langsung

Materi Pokok	Capaian Pembelajaran	Indikator Esensial
PPKn SD	Mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah -masalah dalam membangun kepribadian nasional dan demokrasi konstitusional Indonesia, semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta bela negara	Mampu mengkritisi kelemahan utama pengembangan sistem demokrasi konstitusional di Indonesia

Soal 10

Berikut ini merupakan kelemahan sistem pemerintahan presidensial yang pernah berlaku di Indonesia pada era reformasi yaitu…

A. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen
B. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu lima tahun
C. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya
D. Terlalu banyaknya partai politik yang menyebabkan partai politik lebih banyak mementingkan partainya sendiri
E. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri

Kunci Jawaban: D

Pembahasan

Dalam sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia pada masa orde baru sampai

era roformasi ada banyak kelebihan dan kekurangannya. Salah satu kekurangan demokrasi konstitusional pada masa reformasi adalah terlalu banyaknya partai politik yang menyebabkan partai politik lebih banyak mementingkan partainya sendiri.

Materi Pokok	Capaian Pembelajaran	Indikator Esensial
PPKn SD	Mampu menyusun usulan kebijakan publik untuk perlindungan, pemajuan HAM, serta penegakan hukum secara adil dan benar	Mampu menilai kelemahan usulan kebijakan publik untuk perlindungan, pemajuan HAM, serta penegakan hukum secara adil

Soal 11

Banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia membutuhkan keterlibatan berbagai semua pihak yang langsung dan tidak langsung dalam berbagai penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Kuat lemahnya upaya penegakan dan pemajuan HAM secara langsung di Indonesia ditentukan oleh ....

A. Kesadaran warga negara itu sendiri yang tidak mengetahui bahwa perilakunya melanggar hak asasi manusia
B. UUD 1945 dan Amandemen, Undang-undang, Lembaga kepemerintahan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani HAM.
C. Kemauan politik *(political will)* dari pemerintah yang sedang berkuasa
D. Hakim yang adil dalam memberikan keputusan
E. KOMNAS HAM dan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan belum bekerja maksimal.

Kunci jawaban: B

Pembahasan

Upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut.

a. UUD 1945 dan Amandemen terbentuknya Undang - undang yang mengatur HAM (Keppres Nomor 181 /1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, UU No 39 /1999 tentang HAM, UU NO. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
b. Dibentuknya Lembaga kepemerintahan yang menangani masalah HAM (Komnas HAM, KNPA dan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU No 27/2004)
c. Dibentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat yang memantau pelanggaran HAM

Materi Pokok	Capaian Pembelajaran	Indikator Esensial
PPKn SD	Mampu berperilaku baik sesuai prinsip, nilai, moral, dan norma kewarganegaraan Indonesia yang demokratis dalam konteks kewargaan negara dan dunia	Mampu memberikan argument nilai yang kuat tentang pentingnya perilaku demokratis dalam konteks kewarganegaraan.

Soal 12

Perhatikan ilustrasi berikut.

Bu Sarkas mengikuti rapat pemilihan ketua dasawisma di RTnya, setelah mendengarkan arahan dari Ibu Ketua PKK ada beberapa hal yang menurut pendapatnya tidak sesuai dengan keinginannya. Maka secara spontan Bu Sarkas menyalahkan apa yang disampaikan Ibu Ketua PKK dengan bahasa yang sangat kasar dan menyakitkan hati.

Perilaku Bu Sarkas ini bertentangan dengan norma …. A. Sosial B. Kesopanan C. Hukum D. Agama E. Kesusilaan **Kunci jawaban:** B
Pembahasan
Kesopanan atau etiket lebih berfokus pada perilaku sopan atau tidak sopan yang perlu dipertimbangkan dalam perilaku demokratis sebagai warga negara, hukum lebih berfokus pada aturan yang jelas sangsinya, agama lebih berfokus pada perintah dan larangan yang sanksinya di akherat, sedangkan kesusilaan bersumber dari hati nurani dalam menentukan baik dan buruk. Norma atau kaidah adalah ketentuan, patokan, ukuran yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dibalik ketentuan itu, terdapat norma yang menjadi landasan tingkah laku manusia. Norma kesopanan adalah ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan masyarakat yang didasari oleh beberapa hal diantaranya yaitu kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan juga disebut norma etiket, sopan santun, atau tata krama. Norma sopan santun yang khas dan aktual akan berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Contoh-contoh norma kesopanan: yang muda harus menghormati yang lebih tua usianya, berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu, memakai pakaian yang pantas dan rapi, dan jangan berkata kasar dengan orang lain.

SOAL LATIHAN (KUNCI JAWABAN DI HALAMAN AKHIR)

Soal latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang menurut anda paling benar.

1. Kemajemukan etnis, budaya dan agama yang menjadi latar kehidupan suku bangsa Indonesia dapat memperkokoh kesatuan dalam membangun kehidupan bersama. Namun potensi konflik dapat selalu terjadi dan dapat diatasi dengan mengembangkan konsensus. Hal ini mencerminkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai ….
   A. idiologi konstitusional
   B. ideologi federalistik
   C. ideologi persatuan
   D. ideologi terbuka
   E. ideologi kesatuan

2. Aktualisasi sikap Warga Negara yang cerdas dan bertanggungjawab akan terlihat bukan saja ketika seseorang menjadi aktor politik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, tetapi akan nampak pada kepeduliannya terhadap hal kecil yang sama pentinya di tengah kehidupan masyarakat, hal itu adalah ....
   A. Investasi dana kesehatan masyarakat sebagai peluang bisnis
   B. pengelolaan sampah dan kebersihan sebagai peluang ekonomi
   C. peningkatan katertiban dan kesadaran hukum masyarakat
   D. peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan bersama
   E. peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan masyarakat sebagai hak konstitusional rakyat

3. Salah satu misi pendidikan moral-politik yang diemban oleh dan atau di dalam pelajaran PPKn di persekolahan ...
   A. Mengkritisi pemerintah atas kebijakan publik yang merugikan rakyat.
   B. Menunjukkan rasa cinta dan bangga terhadap lambang Negara Indonesia.
   C. Berjuang keras sebagai politrisi agar dapat menjadi anggota DPR.
   D. Mendukung partai politik pemenang pemilu.
   E. Memuja-muji pemimpin sebagai penguasa.

4. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar kegiatan politik mencerminkan nilai, moral yang sesuai dengan harapan bangsa dan negara landasan etika politik yang harus dijadikan pedoman adalah ....
   A. Undang-undang partai politik
   B. Pancasila
   C. UUD 1945
   D. Cita-cita dan perjuangan partai

E. Pembukaan UUD 1945

5. Kegiatan akhir dalam setiap proses pembelajaran adalah melakukan evaluasi. Adapun prinsip-prinsip khusus dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran PPKn di SD adalah sebagai berikut, kecuali ....
   A. Hasil evaluasi hanya sebagai penunjuk gejala.
   B. Pengukuran dengan indikator kognitif
   C. Makin banyak indicator semakin mendekati keadaan sebenarnya.
   D. Lebih menekankan pada kepentingan siswa.
   E. Pengukuran ranah kolektif

6. Dalam pembelajaran PPKn SD dapat diterapkan suatu strategi yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam kerja sama atau membantu diantara sesama dalam struktur kerja untuk memecahkan masalah bersama. Hal ini merupakan penerapan metode ....
   A. Bermain peran
   B. Value Clarafication Tehnique (VCT)
   C. Sosiodrama
   D. Metoda Proyek
   E. Cooperative learning

7. Dalam pembelajaran PKn adanya pendekatan nilai, norma dan moral Pancasila yang dapat digunakan guru untuk memudahkan siswanya dalam belajar. Adapun yang dimaksud dengan pengertian moral itu sendiri adalah ...
   A. Tatanan aturan hukum yang menjadi sesuatu yg sudah memiliki kekuatan normatif atau kekuatan lain dianut dan diterima serta dilaksanakan masyarakat.
   B. Prinsip-prinsip benar dan salah mengenai tingkah laku.
   C. Pola sikap yang sudah mempribadi atau mapan.
   D. Imperasi keyakinan yang harus dipatuhi oleh penganutnya.
   E. Sesuatu yang berharga, yang dianggap bernilai, adil, baik, benar dan indah serta menjadi pedoman atau pegangan diri.

8. Jika dalam pembelajaran PPKn di sekolah Dasar guru ingin membawa peserta didik ke dalam situasi nyata dan menerapkan hubungan antara pengetahuan dengan kehidupannya sebagai anggota keluarga/masyarakat, implementasi yang tepat harus dilakukannya ....
   A. Pendekatan Sosial
   B. Pendekatan kontekstual
   C. Pedekatan kuantum
   D. Pendekatan lingkungan
   E. Pendekatan konsep

9. Untuk mengejar kemajuan dunia secara global semua Negara bangsa, terutama bagi Negara-Negara yang belum semaju bangsa lain termasuk Indonesia tak ada cara lain, kecuali ....

A. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
B. Mengeksplorasi sumberdaya alam melalui strategi politik pembangunan sumberdaya manusia
C. Memperkuat kekuasaan politik, pertahanan keamanan dan control ekonomi rakyat melalui pajak dan fiscal
D. Bekerjasama saling menguntungkan dalam berbagai bidang dengan Negara-negara pemuncak kemajuan dunia
E. Membuka inverstasi sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk membangun infra struktur yang dibutuhkan rakyat

10. Sebagai warga masyarakat, guru perlu memahami sifat hukum. Hal tersebut di bawah ini merupakan sifat hukum, kecuali ...
    A. mengatur hubungan antara orang yang satu dan yang lain
    B. memberikan adanya kepastian hukum
    C. mengikat dan memaksa
    D. memberikan rasa nyaman dan aman
    E. memberikan rasa keadilan

11. Setiap pelanggaran hukum dapat diancam dengan tuntutan pidana, tetapi tidak setiap pelanggar hukum dan pelanggaran hukumnya atas nama hukum dikenakan sama. Contoh kasus tersebut adalah ...
    A. Sebuah pelanggaran hukum yang dilakukan orang dewasa atas permintaan korban.
    B. Pelanggaran hukum yang terjadi sebagai akibat kecelakaan dan dilakukan oleh anak yang belum dewasa.
    C. Setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak waras.
    D. Setiap pelanggaran hukum baik sengaja atau tidak yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang.
    E. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang yang sedang menduduki jabatan strategis Negara.

12. Sebagai warga masyarakat yang memahami makna demokrasi, selayaknya mampu menafsirkan demokrasi yang berlaku di Indonesia yang saat ini menganut demokrasi konstitusional. Untuk mengidentifikasi pilar-pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, diantaranya adalah seperti yang tersebut ini …
    A. Demokrasi dengan rule of law.
    B. Demokrasi dengan rule of the game.
    C. Demokrasi dengan pemisahan kakuasaan negara.
    D. Demokrasi dengan pemisahan antara hak dan kewajiban.
    E. Demokrasi dengan sistem pemilihan langsung.

13. Republik Indonesia adalah Negara hukum (rechstaat) dan bukan Negara kekuasaan semata (machtstaat), untuk mencapai cita-cita ideal tersebut langkah strategis yang harus dilakukan bersama antara lain adalah ...

A. Memberikan pendidikan hukum sebagai pengetahuan relative sesuai dengan dinamika masyarakat.
B. Memberikan pendidikan hukum sebagai profesi yang terhormat di masyarakat.
C. Memberikan pendidikan hukum berbasis nilai-moral sejak di persekolahan.
D. Memperjuangkan cita-cita politik Republik Indonesia sebagai Negara hukum.
E. Membangun budaya politik berbasis pelaksanaan hukum dan konstitusi.

14. Setelah siswa mempelajari PPKn akan memahami cara menghargai jasa para tokoh dalam proses perumusan dasar negara Pancasila, yaitu dengan ….
    A. Meneladani sikap dan perilaku para tokoh
    B. Menganggap Pancasila sebagai ideologi yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang
    C. Meninggalkan ideologi negara
    D. Mensimulasikan proses perumusan Dasar negara menjelas proklamasi kemerdekaan
    E. Menunjukkan sikap hedonisme

15. Contoh pembelaan penegakan Hukum dan HAM yang dilakukan pemerintah dalam menangani warganegaranya yang terkait kasus pelanggaran hukum dan HAM di luar negeri, adalah melalui ....
    A. Arbritase internasional
    B. Ombusman
    C. Mahkamah Internasional
    D. Diplomasi kebudayaan
    E. Diplomasi politik

16. Penanaman moralitas yang berakar pada budaya bangsa sendiri menjadi kunci penting dalam pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi saat ini, hal itu dimaksudkan agar….
    A. terjadi akulturasi budaya antar suku bangsa di indonesia
    B. bangsa indonesia tidak tertinggal memasuki arus globalisasi
    C. adaptif dengan arus globalisasi saat ini
    D. nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa indonesia
    E. tidak terpengaruh dengan moralitas bangsa asing

17. Fakta keanekaragaman adat istiadat dan bahasa yang merupakan kekayaan budaya bangsa merupakan salah satu sumber penting pengembangan konten PPKn di persekolahan, hal tersebut karena ...
    A. Tujuan pembelajaran PPKn di sekolah bermuara pada terbentuknya prilaku yang mencerminkan nilai budaya bangsa.
    B. Pembelajaran PPKn di sekolah berbasis budaya lebih disukai peserta didik.
    C. Tujuan pembelajaran PPKn di persekolahan berbasis pengetahuan faktual meliput seni dan budaya.

D. Tujuan pembelajaran PPKn di sekolah tak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat dan budaya.
E. Nilai dan budaya yang ada di tengah masyarakat dapat menjadi penghambat modernisasi bangsa.

18. Isu pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (climite change) saat ini dirasakan oleh seluruh warga dunia. Dalam pandangan pendidikan kewarganegaraan memberi makna, bahwa warga dunia perlu ....
    A. mengembangkan iptek yang mampu mengendalikan dan mengatasi perubahan cuaca
    B. melakukan reorientasi terhadap kualitas pendidikan kewarganegaraan dan dunia
    C. menjadikan kepedulian terhadap bumi sebagai prioritas dari setiap warga negara
    D. mewajibkan setiap warga negara menanam pohon dengan semboyan one man one tree
    E. setiap negara bersama warganya melakukan reboisasi massal

19. Penanaman moralitas yang berakar pada budaya bangsa sendiri menjadi kunci penting dalam pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi saat ini, hal itu bermaksud agar….
    A. nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa indonesia
    B. terjadi akulturasi budaya antar suku bangsa di indonesia
    C. adaptif dengan arus globalisasi saat ini
    D. tidak terpengaruh dengan moralitas bangsa asing
    E. meniru cara hidup bangsa yang lebih dulu maju menjadi keniscayaan

20. Perluasan pasal dan ayat tentang hak azasi warga negara dalam amandemen UUD 1945, memberi isyarat bahwa ...
    A. Perlindungan HAM tidak untuk pelaku kejahatan.
    B. HAM memerlukan dinamisasi secara prinsip.
    C. Telah terjadi reformasi HAM dalam konstitusi.
    D. Pengakuan HAM di Indonesia semakin penting.
    E. HAM harus tetap dilindungi secara konstitusional.

21. Pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945, memerlukan aturan teknis yang mempermudah penerapannya. Petunjuk pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 ini dikenal dengan….
    A. Nilai budaya bangsa
    B. Nilai pragmatis
    C. Nilai praktis
    D. Nilai instrumental
    E. Nilai fundamental

22. Instrumen HAM yang dapat memperkuat dan menjamin penegakan HAM secara adil adalah….
    A. kepastian hukum HAM, keadilan HAM dan ketaatan hukum HAM masyarakat

B. Undang-Undang HAM, KOMNAS HAM dan Peradilan HAM
C. kesadaran hukum HAM, penegakan hukum HAM dan ketegasan eksekusi HAM
D. penegak hukum HAM, konstitusi HAM dan Peradilan HAM yang bebas
E. pemberdayaan dan peningkatan partisipasi relawan sosial

23. Bangsa Indonesia telah lama menganut sesanti Bhineka Tunggal Ika namun konflik sosial horizontal selalu dapat terjadi. Hal itu secara factual dimungkinkan lebih disebabkan oleh ....
A. Perbedaan ras, suku dan budaya
B. Perseteruan cita-cita politik sebagai bangsa
C. Persaingan elit politik dan penguasaan hajat ekonomi
D. Perselisihan agama dan keyakinan
E. Perbedaan adat dan bahasa

24. Gejala kenampakan kalangan muda yang tidak khikmat dalam menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada saat upacara bendera, adalah pertanda menurunnya ....
A. prinsip kepribadian nasional dan cinta tanah air
B. semangat belajar PPKn
C. prinsip berkebangsaan dari warga negara
D. semangat kebangsaan dan cinta tanah air
E. semangat konstitusional bangsa indonesia

25. Portopolio sejatinya dimaksudkan untuk kepentingan penilaian, hal itu karena model portopolio meliput berbagai aspek yang mencerahkan guru dalam memberikan asesmen autentik bagi peserta didik. Alasan portopolio diadopsi menjadi model pembelajaran, antara lain karena ...
A. Implementasi portopolio di dalam praksisnya berbasis proses aktif partisipatif, kreatif dan produktik segenap peserta didik
B. Untuk memfasilitasi pengalaman belajar yang unik bagi siswa
C. Untuk menolong capaian hasil belajar siswa yang masih kurang
D. Taka da jawaban yang benar
E. Tak ada lagi model pembelajaran yang baru

26. Setiap Negara bangsa berkepentingan mengusung nasionalisme sebagai identitas yang harus dipelihara dijaga, dan dipertahankan koeksistensinya terutama di dalam ....
A. spirit mental dan kepribadiannya
B. kemajuan aplikasi teknologinya
C. simbol kekuatan pertahanan dan persenjataannya
D. syair lagu kebangsaannya
E. sistem hukum tatanegaranya

LAMPIRAN KUNCI JAWABAN
LATIHAN SOAL

Kunci Jawaban:

1.	C	14.	D
2.	D	15.	E
3.	B	16.	D
4.	B	17.	A
5.	B	18.	C
6.	E	19.	A
7.	B	20.	B
8.	B	21.	D
9.	D	22.	B
10.	D	23.	C
11.	D	24.	E
12.	A	25.	A
13.	C	26.	A